BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat atau beberapa pihak menyebutnya sebagai *filantropi* Islam telah menjadi isu yang sangat penting dalam upaya mengikis kemiskinan, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada masa sekarang pembicaraan tentang zakat khususnya zakat profesi telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta dan lain-lain.¹

Membahas tentang zakat sudah bukan hal yang asing karena pelaksanaan zakat dikalangan muslim terkhusus muslim Indonesia sebenarnya sudah sangat lama dijalankan sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengalaman ajaran agama Islam. Akan tetapi baru zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Sedang zakat maal yang seharusnya potensial masih kurang mendapatkan perhatian.

Penyebab rendahnya penerimaan zakat yang diperoleh adalah masih rendahnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat resmi karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari badan zakat nasional. Padahal penyaluran zakat melalui zakat organisasi pengelola zakat akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat yang belum

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 414.

sepenuhnya efisien dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dalam pengelolaan zakat belum maksimal.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan dan²a zakat agar berdaya dan berhasil guna diperlukan regulasi manajemen zakat yang terstruktur dengan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pencatatan.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nash secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan dikembangkan dari yang dikenal selama ini.³

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.⁴ Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat

²Indrayani, R., et al., Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shaodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda.universitas Mulawarman, h.3.

³Asnaini, Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 42.

⁴Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 101.

mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Akan tetapi, zakat adalah tanggung jawab orang Islam.⁶ Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁷

BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah.⁸

⁵Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 108.

⁶Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1999), h. 256.

⁷Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 6.

⁸Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007)h. 98.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.⁹

Zakat produktif sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jika disalurkan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahiq melalui modal usaha sama halnya dengan investasi, kesamaan tersebut terletak pada manfaat jangka panjang yang dihasilkan oleh keduanya. Dengan begitu, pertumbuhan usaha kecil di masyarakat akan bertambah, jika usaha kecil meningkat maka akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Mustahiq yang dulunya bekerja sebagai buruh, karyawan swasta atau masih menjadi pengangguran akan menjadi lebih produktif dan mendapatkan penghasilan dari usaha yang dimiliki.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LPEI FEB Universitas Negeri Airlangga (2013) bahwa perkiraan potensi zakat yang ada di Indonesia didasarkan pada perhitungan pendapatan keluarga muslim sejahtera dikalikan tarif adalah sebesar Rp 101,96 triliun dengan jumlah muzakki sebesar 31.495.237 keluarga dan Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita (PNBPK) sejumlah Rp 32.371.459,18. Islam menganggap serta menganjurkan penarikan dan

⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h. 878.

pendayagunaan zakat sebagai salah satu kebijakan fiskal yang keberadaannya sangat diperlukan dan penting bagi kemajuan perekonomian negara.¹⁰

Penyaluran zakat berupa modal kerja atau modal usaha diharapkan mampu menunjang pertumbuhan usaha masyarakat. Masyarakat yang mempunyai usaha akan terbantu dengan dana tersebut, baik untuk menambah modal kerja ataupun untuk melengkapi peralatan produksi. Perkembangan usaha kecil menengah dengan zakat produktif diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, dengan adanya penyerapan tenaga kerja tersebut maka akan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga mampumenjadi indikator adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu usaha yang dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi adalah Usaha Kecil Menengah. Kontribusi UMKM pada perekonomian telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman dari akses krisis.¹¹ Hingga sampai saat ini, usaha kecil dan menengah selalu dianggap sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, hal ini karena Usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan berada dalam lingkup skala usaha kecil. Akan tetapi permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM pada umumnya selalu bergelut pada bidang permodalan. Oleh karena itu, untuk memudahkan dan mewujudkan pertumbuhan usaha kecil dibutuhkan adanya

¹⁰Harry Azhar Azis, dkk, *Zakat dan Pemberdayaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 111.

¹¹Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 11.

lembaga yang mampu menyalurkan modal usaha bagi perkembangan usaha masyarakat. Dan Badan Amil Zakat Nasional dengan program zakat produktif merupakan lembaga yang tepat sebagai lembaga yang mampu memberikan modal usaha disertai dengan bimbingan kepada *mustahiq*.

Zakat dalam pemberdayaan ekonomi berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha dan membantu pembangunan ekonomi dalam sektor Usaha Mikro. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Namun, jika penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, namun dihimpun, dikelola, didistribusikan dan diberdayakan oleh badan atau lembaga yang amanah dan professional.

Badan Amil Zakat Nasional Bone atau sering disebut BAZNAS Kab Bone merupakan badan yang mengurus Zakat di Kabupaten Bone. BAZNAS Kabupaten Bone mampu meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat dengan cara menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat Nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan pengelolaan yang amanah, profesional, transparan serta terintegrasi. BAZNAS Kabupaten Bone dalam menjalankan program pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat mengutamakan pendistribusian yang dimanfaatkan oleh mustahik untuk pemberdayaan ekonomi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam mengembangkan usaha mikro di Kab. Bone.

Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang diambil untuk modal usaha dan pengetahuan tentang indikasi efektivitas dalam memberikan zakat terhadap

pendayagunaan usaha mikro penting sebagai masukan untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif. Di samping itu, praktek pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi apakah sudah benar-benar tercapai atau belum, sehingga hasilnya memang benar dirasakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Watampone”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah mengenai hal tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat di BAZNAS Bone terhadap perkembangan usaha mikro?
2. Bagaimana Efektivitas pendayagunaan zakat di BAZNAS dalam mengembangkan usaha mikro di kota Watampone?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang telah diangkat maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat di BAZNAS Bone terhadap perkembangan usaha mikro.
 - b. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat di BAZNAS dalam mengembangkan usaha mikro di kota Watampone.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang bisa di dapatkan dari penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang implementasi pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro, baik secara teori maupun praktiknya. Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum bahwa setiap lembaga pemerintah baik yang berada di kota maupun desa wajib memperhatikan program-program pendayagunaan zakat dalam pengembangan usaha mikro.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat, lembaga pemerintah, maupun pihak swasta dalam menjalankan program pendayagunaan zakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertempat di Jln.Ahmad Yani Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan objek penelitiannya adalah efektivitas pendayagunaan zakat dalam pengembangan usaha mikro di kota watampone.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman persetujuan pembimbing, abstrak, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar transliterasi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori yang berisi pendayagunaan zakat dan usaha mikro. Dalam sub-bab pendayagunaan zakat dijelaskan tentang ruang lingkup zakat. Sub-bab biaya produksi menjelaskan tentang definisi UMKM.. Bab ini pun berisi tentang kerangka pikir peneliti.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik/ alat analisis data.

Kemudian dilanjutkan bab IV berisi tentang hasil penelitian, berupa jawaban dari pertanyaan/ masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian yang telah ditampilkan sebelumnya diuraikan, dibahas sesuai dengan kajian pustaka yang telah ditentukan pada bab II dan dianalisis dengan menggunakan teknik/ alat analisis yang telah ditentukan pada bab III.

Selanjutnya bab V yang berisi tentang penutup, sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu meliputi simpulan dan implikasi.

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.